

Purbaya Ancam Sikat Oknum Bea Cukai

Dari Halaman 1

jadi yang masih mau jual harus berhenti," ujarnya.
Selain itu, Purbaya akan menugaskan Dirjen Bea Cukai mengecek secara acak orang yang masuk lewat jalur hijau di bandara. Ia berkata selama ini jalur itu tak dicek, tetapi ada kemungkinan disalahgunakan pengedar rokok

Selama 2025, Prabowo Sudah Kucurkan

Dari Halaman 1

Kemudian, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp18,3 triliun untuk 10 juta KPM dan KIP Kuliah sebesar Rp8,2 triliun untuk 895,9 ribu mahasiswa, serta PIP Rp6,6 triliun untuk 11,3 juta siswa.
Anggaran bansos ini belum termasuk 8 program paket ekonomi semester II-2025 yang baru diumumkan pekan lalu. Total anggaran paket stimulus ekonomi akan mencapai

Kejatisu Didesak Periksa Sekretaris DPRD Medan

Dari Halaman 1

Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU). Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik, mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) segera turun tangan memeriksa Sekretaris DPRD Medan.
Menurut Azhari, angka kelebihan pembayaran sebesar miliaran rupiah tersebut jelas-jelas merugikan keuangan negara. Ia menilai, jika tidak segera ditindaklanjuti, maka temuan BPK ini berpotensi hanya menjadi catatan tanpa konsekuensi hukum.
"Ini kan sudah menjadi temuan resmi BPK. Sekretaris DPRD Medan wajib segera mengembalikan kelebihan bayar itu ke kas daerah. Kalau tidak dikembalikan, patut diduga ada penggunaan dana fiktif. Kejatisu harus bergerak cepat menindaklanjuti kasus ini," tegas Azhari saat dikonfirmasi wartawan melalui WhatsApp, Minggu (21/9/2025).
Azhari menambahkan, dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas tidak bisa dianggap persoalan sederhana. Kelebihan pem-

ilegal.
"Mungkin dalam waktu dekat kita akan dapat banyak orang (pengedar rokok ilegal) di situ," ujar Purbaya.
Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu mengemukakan 752 juta batang rokok ilegal selama 2024. Rokok-rokok itu merupakan hasil dari 22 ribu penindakan sepanjang tahun lalu.
Ditjen Bea dan Cukai melihat potensi gangguan terhadap industri rokok akibat kemuncu-

Rp15,66 triliun. Jumlah itu terdiri dari APBN sebesar Rp12,79 triliun dan non-APBN sebesar Rp2,87 triliun.
"Kita sedang mendesain, menyiapkan, dan akan menjalankan delapan program paket ekonomi semester II-2025. Untuk program ini ada magang, perluasan PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata hingga padat karya tunai," terang Suahasil.
Berdasarkan catatan Kemenkeu, secara total belanja negara sudah terealisasi sebesar

bayaran dalam jumlah besar membuka ruang kecurigaan publik, bahwa praktik fiktif bisa saja terjadi, terutama jika bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas tidak dapat ditelusuri dengan jelas.
Ia menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas agar kasus serupa tidak berulang setiap tahun.
"Ini bukan hanya soal angka Rp4,4 miliar, tapi soal moral dan tata kelola keuangan negara. Jika dibiarkan, maka publik akan semakin apatis terhadap kinerja DPRD Medan," katanya.
Dorongan Audit Lanjutan 2023-2025
Selain menyoroti temuan BPK tahun 2023, LIPPSU juga mendorong agar Kejatisu melakukan perbandingan penggunaan anggaran perjalanan dinas DPRD Medan dari tahun 2023 hingga 2025.
Menurut Azhari, tren kenaikan atau penurunan anggaran bisa menjadi indikator penting untuk menilai apakah penggunaan dana perjalanan dinas memang wajar atau justru semakin membengkak tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
"Nah, kita harus bandingkan, apakah dari

lan rokok ilegal.
Dirjen Bea Cuka Djaka Budhi Utama menyampaikan hal itu saat ditanya tentang maraknya rokok ilegal. Fenomena ini terjadi dan berbuntut lesunya industri tembakau dalam negeri.
"Inshaallah saya akan melakukan pembentukan satgas, satgas pencegahan rokok ilegal dan cukai rokok," ujar Djaka pada konferensi pers APBN KITA Juni 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/6).(cnni/js)

Rp1.960,3 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.388,8 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp571,5 triliun.
Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari belanja K/L Rp686 triliun dan belanja nonkementerian/lembaga Rp702,8 triliun.
Belanja K/L disalurkan melalui belanja pegawai sebesar Rp212,8 triliun, belanja barang Rp232,2 triliun, belanja modal Rp232,2 triliun dan belanja bansos Rp101,1 triliun.
(cnni/js)

2023 sampai 2025 anggaran perjalanan dinas DPRD Medan makin meningkat? Kalau meningkat, maka ada potensi besar bahwa praktik fiktif terus berlangsung. Masyarakat berhak tahu, karena ini menyangkut uang rakyat," jelasnya.
Sorotan Publik
Kasus ini semakin menyedot perhatian publik di tengah sorotan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Azhari menilai, DPRD sebagai lembaga legislatif seharusnya menjadi teladan dalam pengelolaan keuangan. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan adanya dugaan penyimpangan serius.
"Yang kita butuhkan sekarang adalah transparansi. Semua laporan perjalanan dinas harus terbuka, lengkap dengan administrasi dan bukti-bukti yang sah. Kalau benar ada perjalanan dinas, tunjukkan buktinya. Jangan sampai uang rakyat hilang begitu saja tanpa pertanggungjawaban," pungkas Azhari.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat DPRD Kota Medan belum memberikan keterangan resmi terkait temuan BPK maupun desakan LIPPSU agar Kejatisu segera turun tangan.(A-10)

Sidang Gugatan Ijazah Gibran di PN Jakpus

Dari Halaman 1

Setelah kedua pihak sepakat dengan penunjukan Hakim Mediator itu, kata dia, nantinya mediasi pertama akan dilakukan pada Senin (29/9) mendatang.
Budi menjelaskan, sidang selanjutnya baru akan dilanjutkan setelah Majelis Hakim mendapatkan laporan dari hakim mediator.
Ia menyebut apabila dalam tahapan mediasi

tersebut ada kesepakatan dari kedua belah pihak maka akan dituangkan ke dalam kesepakatan damai.
"Mudah-mudahan bisa damai," pungkasnya.
Perkara ini diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari Budi Prayitno, Abdul Latip dan Arlen Veronica. Adapun penggugat atas nama Subhan yang memiliki latar belakang sebagai pengacara.
Dalam petituannya, Subhan meminta majelis hakim menyatakan Gibran tidak sah menjadi Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Sebab, Gibran

tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI, sehingga tidak memenuhi syarat dalam pendaftaran Cawapres pada Pilpres lalu.
Selain itu, Subhan juga meminta majelis hakim menghukum Gibran dan KPU membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp125 triliun. Uang itu diminta untuk disetorkan ke kas negara lalu selanjutnya dibagikan ke setiap warga negara.
(cnni/js)

Anggota DPR Pertanyakan Istilah 'Ibu Kota Politik' IKN

Dari Halaman 1

menjalankan fungsi pusat pemerintahan sebagaimana terdapat di Pasal 12 ayat (1) UU No 21 Tahun 2023 tentang IKN. Tidak ada sama sekali menyebut frasa Ibu Kota Politik," kata Khozin di Jakarta, Sabtu (20/9).
Khozin pun meminta pemerintah menjelaskan mengenai perubahan frasa 'Ibu Kota Politik' dalam lampiran di Perpres No 79 Tahun 2025.
Perpres No 79 Tahun 2025 ini sekaligus merevisi aturan sebelumnya yakni Perpres No 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
Menurut dia, penyebutan Ibu Kota Politik perlu diperjelas apakah perubahan frasa ini dapat diartikan secara definitif pindah ibu kota negara atau sekadar penyebutan semata.
"Apakah Ibu Kota Politik sama dengan ibu kota negara? Ketika Ibu Kota Politik dimaknai sama dengan Ibu Kota Negara, maka ada konsekuensi politik dan hukum," ujarnya.
Dia menguraikan, Pasal 39 (1) UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN, perpindahan ibu kota negara diwujudkan dengan penerbitan Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota negara.
"Implikasi politik dan hukum akan muncul ketika Ibu Kota Negara secara definitif pindah dari Jakarta ke IKN," tuturnya.
Menurut Khozin, jika Ibu Kota Politik dimaknai sebagai Ibu Kota Negara, maka keputusan ini harus menjadi agenda bersama seluruh cabang kekuasaan negara, termasuk lembaga-lembaga di luar negara, dan lembaga internasional yang

berada di Indonesia.
"Ketika Ibu Kota Negara definitif berpindah ke IKN, maka ada konsekuensi yang harus disiapkan dari sekarang, tidak hanya oleh pemerintah tetapi oleh lembaga di luar pemerintah termasuk lembaga internasional yang berada di Indonesia," kata Khozin.
Namun, kata Khozin, jika yang dimaksud Ibu Kota Politik merupakan pusat pemerintahan sebagaimana tertuang dalam UU IKN, sebaiknya tak perlu membuat istilah baru yang justru potensial menimbulkan pertanyaan publik.
"Jika yang dimaksud ibu kota politik itu tak lain adalah pusat pemerintahan, sebaiknya tak perlu buat istilah baru yang menimbulkan tanya di publik," tuturnya.
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang di dalamnya membahas rencana pembangunan kawasan IKN sebagai ibu kota politik di 2028.
Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Pemerintah Tahun 2025 memuat tahapan pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan penjabaran tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Kemudian pada Highlight Intervensi Kebijakan, terdapat serangkaian intervensi termasuk pemindahan ibu kota ke IKN.
"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di

tahun 2028..." demikian yang tertulis dalam Perpres.
Dalam penjelasan Perpres, IKN disebutkan luas area kawasan inti pusat dan sekitarnya mencapai 800-850 hektar. Kemudian persentase pembangunan gedung atau perkantoran mencapai 20 persen.
Selain itu, persentase pembangunan hunian atau rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan IKN mencapai 50 persen.
Dalam Perpres juga dijabarkan soal pemindahan dan atau penugasan ASN ke IKN. Total sekitar 1.700-4.100 orang ASN yang bakal ditugaskan di sana.
Demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan di sana, dibangun rumah baru sebanyak 476 unit, kemudian ada sebanyak 38.504 unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya.
Pembangunan IKN sudah dimulai sejak 2022 atau era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jokowi, sapaan akrabnya, menyampaikan pembangunan IKN didasari semangat pemerataan di Indonesia. Ia ingin pembangunan tidak lagi Jawa-sentris, tetapi Indonesia-sentris.
"Betapa sangat padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan sehingga tidak Jawa-sentris tapi Indonesia-sentris," kata Jokowi dalam acara itu yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu (22/2).
Dia menambahkan proses pembangunan bisa rampung dalam kurun waktu 15-20 tahun ke depan. Saat selesai, Jokowi menyebut IKN bakal jadi kota pemerintahan.(cnni/js)

Rakyatnya Sehat, Kenyang, dan Bersekolah

Dari Halaman 1

minta jauh lebih sederhana. Kalau sakit, jangan terhenti di pintu rumah sakit. Kalau belanja, harga beras dan minyak jangan bikin kepala pening. Dan kalau punya anak, jangan sampai pulang sekolah hanya karena orang tua tak mampu bayar biaya.
Soal kesehatan, Delisderang memang sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Angka kepesertaan tinggi. Tapi apa artinya angka jika di lapangan rakyat masih dipungut soal iuran? Apa gunanya klaim UHC kalau kartu yang digenggam warga hanya indah dilihat, tapi tak kuasa menolong saat mereka butuh obat?
Nabi SAW pernah bersabda, "Barangsiapa di pagi hari merasa aman pada dirinya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya." Sehat adalah nikmat besar, maka memastikan warganya bisa berobat adalah amanah utama pemerintah.

Soal pangan, Bupati bersama jajarannya rajin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai kecamatan. Tujuannya bagus dalam rangka stabilisasi harga, ketersediaan stok, meringankan beban masyarakat. Tapi jangan lupa, rakyat tahu siapa yang paling menentukan harga. Pasar tradisional, warung kecil, pedagang sayur keliling, semuanya berputar dalam rantai panjang distribusi. Jika tengkulak dan mafia pangan tidak disentuh, harga murah hanya akan jadi cerita di spanduk. Padahal Allah sudah mengingatkan, "Timbanglah dengan timbangan yang adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya." (QS. Asy-Syu'ara: 181-183). Menjamin pangan murah dan adil bukan sekadar program, tapi perintah agama.
Soal pendidikan, memang ada kursi dan bangku sekolah. Gedung sekolah pun berdiri. Toilet kini direhabilitasi agar siswa belajar di lingkungan yang sehat dan nyaman. Bupati menyebut sekolah sebagai rumah kedua bagi siswa. Pernyataan itu indah. Tapi sekolah bukan hanya soal bangunan dan toilet. Yang lebih penting adalah kualitas guru, kelengkapan

sarana belajar, dan kesempatan yang sama bagi anak-anak di pelosok.
Rasulullah SAW menekankan, "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim, laki-laki maupun perempuan." Jangan sampai anak-anak di Lubukpakam mendapat pendidikan penuh, sementara anak-anak di pelosok masih tertinggal karena akses dan fasilitas terbatas.
Tiga janji itu sejatinya juga tiga ujian. Apakah pemerintah benar-benar berani mengeksekusi, atau hanya berhenti pada kata-kata manis? Apakah berani melawan spekulasi pangan, berani menambah fasilitas kesehatan, berani memperbaiki sekolah-sekolah di pinggiran?
Delisderang memang tidak butuh kota cangkih dengan gemerlap pencitraan. Yang dibutuhkan rakyat hanyalah kabupaten yang sehat tubuh warganya, murah pangannya, dan cerdas anak-anaknya. Islam telah mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah, dan amanah itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Dari janji sederhana itulah peradaban sejati dimulai. Dari janji yang mungkin terdengar kecil, tapi sejatinya sangat besar bagi kehidupan rakyat. (*)

Menaker Ungkap Nasib ...

Dari Halaman 1

sebelumnya menetapkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen. Itu berlaku untuk semua provinsi di Indonesia.
Sementara itu, sejumlah serikat buruh menuntut pemerintah menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen.(cnni/js)

Bobby Nasution Jajal

Dari Halaman 1

pelayanan publik, terutama daerah kepulauan dan pesisir.
Hal itu disampaikan Bobby Nasution usai melakukan Demo Flight Pesawat Amfibi (Seaplane) di Pelabuhan Mariana Resort, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samsir, Senin (22/9/2025). "Ini salah satu pendekatan transportasi menuju Danau Toba, khusus Pulau Samsir. Di sini ada penginapan yang kita tahu bintang lima, yang menjadi pendaratan untuk pesawat amfibi," ujarnya.
Setelah ini, lanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samsir serta instansi yang terkait akan melanjutkan ke Kementerian Perhubungan, guna menguruskan semua izin yang berkaitan. Karena meskipun mendarat di air, namun tidak boleh sembarangan.
"Tadi kita sudah mencoba demo flight dari Bandara Silangit. Demo flight adalah salah satu syarat dimana tempat pendaratan. Rasa enak," ungkap Bobby, saat ditanya wartawan.
Bobby berharap, dengan bertambahnya moda transportasi yang ada di Provinsi Sumut, khususnya Kawasan Danau Toba, maka akan ada pertumbuhan kunjungan wisatawan.
Seaplane sendiri ditargetkan bisa beroperasi di kawasan Danau Toba, secara komersil paling lambat tahun 2026. Pemprov Sumut nantinya juga mencoba untuk mengajak maskapai lainnya untuk berkolaborasi, agar para pengunjung Danau Toba bisa menggunakan seaplane atau pesawat amfibi tersebut.
"Nanti kita coba sampaikan ke beberapa maskapai, agar penumpang yang menuju Danau Toba bisa langsung naik ini (Seaplane)," ucapnya.
Sementara Direktur Utama (Dirut) PT Parna Raya Group Charles A Simbolon mengatakan, kehadiran pesawat amfibi ini diharapkan bisa memberikan kemudahan akses bagi wisatawan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata.
"Mudah-mudahan pengunjung pariwisata di kawasan Danau Toba semakin bertambah. Apalagi Badan Otoritas Danau Toba telah menargetkan kunjungan wisatawan dari 700.000 jiwa menjadi 1 juta wisatawan," ujarnya.
Diketahui bahwa PT Parna Raya Group merupakan salah satu investor pernebangan pesawat amfibi di Danau Toba. Pesawat yang digunakan saat demo flight di perairan Danau Toba adalah pesawat model baru buatan tahun 2023. Ini merupakan pernebangan pesawat Amfibi perdana yang mendarat di Danau Toba.
"Ini inisiatif Gubernur Sumut bersama Bupati Samsir dan Samsir. Kalau semua lancar, paling lambat tahun depan sudah bisa digunakan masyarakat. Mengenai rute dan harga, nanti akan dilakukan pembahasan setelah ini," ujarnya.
Turut hadir pada demo flight tersebut Bupati Samsir Vandiko Gultom serta pimpinan OPD Pemprov dan Pemkab Samsir. (A-05)



Sikat Rokok Ilegal

Dari Halaman 1

Masyarakat tentu akan menunggu, apakah ini sekadar jargon konferensi pers atau benar-benar terwujud dalam tindakan nyata yang terukur.
Langkah menggandeng marketplace untuk menutup ruang penjualan rokok ilegal di platform digital bisa disebut inovatif. Di era e-commerce, transaksi rokok ilegal memang banyak berpindah ke ruang daring. Jika kerja sama ini berjalan, ruang distribusi setidaknya bisa menyempit. Demikian juga rencana pemeriksaan acak jalur hijau bandara, meski tetap perlu diwaspadai agar tidak menimbulkannya potensi pungutan liar ataupun memperlambat arus penumpang.
Meski demikian, pemberantasan rokok ilegal tidak boleh hanya berfokus pada aspek penindakan. Harus ada keberanian untuk melihat akar masalah. Selama harga rokok legal terus naik akibat cukai yang tinggi, konsumen khususnya masyarakat berpenghasilan rendah akan cenderung mencari alternatif lebih murah. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh produsen dan pengedar rokok ilegal. Dengan kata lain, fenomena rokok ilegal adalah gejala dari kontradiksi kebijakan pemerintah: satu sisi menaikkan cukai untuk mengendalikan konsumsi, sisi lain bergantung pada penerimaan negara dari sektor yang sama.
Situasi ini membuat arah kebijakan pemerintah terlihat ambigu. Jika tujuan utamanya kesehatan masyarakat, seharusnya strategi tidak berhenti pada menaikkan cukai dan menindak pelangaran. Program edukasi publik, diversifikasi sumber penerimaan negara, serta dukungan transisi bagi petani tembakau dan pekerja industri rokok menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Selain itu, satgas pencegahan rokok ilegal yang direncanakan Ditjen Bea Cukai juga perlu bekerja dengan prinsip transparansi. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana penindakan dilakukan, siapa saja yang ditangkap, dan bagaimana proses hukum dijalankan. Tanpa itu, penindakan akan kembali dipersepsikan sebagai "operasi kosmetik" untuk menenangkan publik, sementara jaringan besar tetap tak tersentuh.
Peredaran 752 juta batang rokok ilegal yang berhasil diamankan sepanjang 2024 menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Jumlah tersebut tidak mungkin bergerak tanpa jaringan distribusi kuat yang melibatkan banyak pihak, termasuk kemungkinan adanya perlindungan dari oknum aparat. Di titik inilah komitmen Purbaya untuk "menyikat anak buah sendiri" diuji.
Dari sisi industri, rokok ilegal memang merugikan perusahaan rokok legal yang harus menanggung beban cukai besar. Namun, harus diingat bahwa industri rokok legal pun menyumbang persoalan kesehatan publik yang tidak kecil. Dengan demikian, pemberantasan rokok ilegal jangan sampai hanya menjadi tameng untuk melindungi kepentingan industri rokok besar, sementara isu kesehatan masyarakat dipinggirkan.
Pada akhirnya, publik menunggu lebih dari sekadar retorika. Apakah pemerintah mampu benar-benar menu-tup keran peredaran rokok ilegal, sekaligus menata ulang kebijakan rokok secara komprehensif? Atau justru pemberantasan ini hanya menjadi siklus wacana rutin yang tak pernah tuntas?
Ketegasan Purbaya akan diuji bukan pada kerasnya pernyataan, melainkan pada konsistensi kebijakan dan keberanian menyentuh aktor besar di balik layar. Jika tiga bulan ke depan janji itu terbuktikan, publik mungkin bisa sedikit lebih percaya. Namun jika gagal, publik hanya akan menambah daftar panjang retorika pemerintah yang tak pernah sampai pada bukti.